

Analisis Implementasi Kebijakan Program *Sustainable Development Goals* Terhadap Pemberdayaan Ekonomi dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Pakkasalo Kec. Sibulue Kab. Bone)

Anggi Ardiawanti¹, Zulkifli², dan Hasni³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone

E-mail: ardiawantianggi@gmail.com¹, zulkifli@iain-bone.ac.id², hasni.abdsalam@gmail.com³

Article History:

Received: 11 Juni 2025

Revised: 25 Juni 2025

Accepted: 27 Juni 2025

Keywords: *Sustainable Development Goals (SDGs), Pemberdayaan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Desa, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SDGs di Desa Pakkasalo telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Namun, terdapat hambatan yang signifikan, seperti akses infrastruktur yang terbatas, kurangnya modal usaha, dan minimnya pengetahuan teknis di bidang ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menambahkan wawasan mengenai implementasi SDGs di wilayah pedesaan serta temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda global yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Tujuan-tujuan ini diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 dan mencakup berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, implementasi SDGs merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional (Kharisma, 2020). Salah satu fokus utama dari SDGs adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Di desa-desa, termasuk Desa Pakkasalo di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, penerapan kebijakan ini menjadi sangat

krusial untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Implementasi kebijakan program SDGs di Desa Pakkasalo menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya program-program tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi dan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka (Anwar, 2020).

Secara keseluruhan, tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Pakkasalo masih perlu ditingkatkan. Implementasi kebijakan program Sustainable Development Goals diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas perumahan, dan ketersediaan infrastruktur dasar. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pakkasalo dapat meningkat secara berkelanjutan.

Desa Pakkasalo, yang terletak di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, adalah salah satu desa yang menjadi fokus dalam implementasi kebijakan SDGs di Indonesia. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. Bidang Pertanian, Jumlah Petani Di Desa Pakkasalo, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Berdasarkan data dari pemerintah desa, terdapat sekitar 300 petani yang aktif mengolah lahan pertanian. Komoditas utamanya Padi, jagung, dan Kacang Tanah merupakan komoditas utama yang dihasilkan. Sebagian besar petani masih menggunakan metode pertanian tradisional (Kementerian Pertanian, 2020). Bidang Perikanan, Jumlah Nelayan Desa ini juga memiliki sekitar 100 nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Komoditas Utamanya Ikan air tawar dan beberapa jenis ikan laut yang ditangkap di perairan sekitar desa (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan, seperti akses infrastruktur, modal, dan pengetahuan teknis.

Pertama, Keterbatasan Akses Infrastruktur, Akses jalan yang buruk dan kurangnya sarana transportasi mempersulit petani dan nelayan dalam mendistribusikan hasil panen dan tangkapan mereka ke pasar. Hal ini mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi dan menurunkan daya saing produk mereka. Serta sistem irigasi yang tidak memadai menjadi kendala utama bagi petani. Kekurangan air irigasi terutama pada musim kemarau menghambat produktivitas lahan pertanian.

Kedua, Keterbatasan Modal, banyak petani dan nelayan yang kesulitan mendapatkan akses ke kredit atau pinjaman modal untuk mengembangkan usaha mereka. Bank dan lembaga keuangan sering kali menetapkan syarat yang sulit dipenuhi oleh masyarakat desa (Handayani, 2019). Bantuan modal dari pemerintah atau lembaga terkait sering kali tidak merata dan tidak tepat sasaran, sehingga banyak petani dan nelayan yang tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Ketiga, Keterbatasan Teknis, banyak petani dan nelayan yang masih menggunakan teknik tradisional dan kurang memiliki pengetahuan tentang teknologi pertanian dan perikanan yang lebih modern dan efisien. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas hasil. Program pelatihan dan penyuluhan dari pemerintah atau lembaga terkait sering kali tidak mencapai seluruh masyarakat desa atau tidak berkelanjutan, sehingga banyak petani dan nelayan yang tidak mendapatkan pengetahuan yang diperlukan. Akses terhadap alat dan mesin pertanian modern, serta teknologi penangkapan dan pengolahan ikan, masih sangat terbatas. Hal ini menghambat kemampuan petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil (Yuliana, 2019).

Dengan memahami data dan keterbatasan yang dihadapi di bidang pertanian dan perikanan, diharapkan implementasi kebijakan SDGs di Desa Pakkasalo dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga potensi sumber daya alam yang dimiliki desa ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan program Sustainable Development Goals (SDGs) telah banyak dilakukan, dengan berbagai fokus dan pendekatan yang beragam. Kebanyakan penelitian sebelumnya cenderung mengeksplorasi dampak SDGs dalam konteks makro atau wilayah perkotaan. Misalnya, Rahman et al. (2022) mengkaji dampak SDGs terhadap pengembangan ekonomi di wilayah perkotaan di Indonesia, dengan menemukan bahwa kota-kota besar yang memiliki infrastruktur yang lebih baik cenderung lebih cepat dalam mengadopsi dan melaksanakan tujuan-tujuan SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat urban.

Selain itu, penelitian Yulianti dan Kurniawan (2021) berfokus pada implementasi SDGs di provinsi-provinsi besar di Indonesia, yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sering kali dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung. Mereka menekankan bahwa daerah dengan tingkat dukungan kebijakan yang lebih tinggi dan sumber daya yang memadai cenderung lebih berhasil dalam mencapai target-target SDGs.

Namun, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang ada mengenai implementasi SDGs di wilayah pedesaan. Banyak penelitian masih kurang memberikan perhatian pada konteks mikro, seperti pada Penelitian oleh Zhang et al. (2020) Dalam studinya tentang implementasi SDGs di berbagai negara berkembang, Zhang et al. menunjukkan bahwa banyak penelitian dan kebijakan cenderung berfokus pada wilayah perkotaan karena lebih mudah diakses dan memiliki data yang lebih lengkap. Mereka menemukan bahwa wilayah pedesaan sering kali kurang mendapat perhatian yang cukup dalam penelitian SDGs, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Studi oleh Johnson dan Smith (2019), Penelitian ini mengkaji distribusi investasi dan perhatian kebijakan SDGs di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Mereka menemukan bahwa wilayah pedesaan sering kali tertinggal dalam hal perhatian penelitian dan alokasi sumber daya untuk pelaksanaan SDGs. Studi ini menekankan bahwa tantangan unik yang dihadapi oleh desa-desa, seperti kurangnya infrastruktur dan dukungan kebijakan yang memadai, sering kali diabaikan dalam penelitian dan implementasi SDGs.

Dengan mengacu pada beberapa penelitian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa memang ada kesenjangan dalam literatur mengenai implementasi SDGs di wilayah pedesaan. Penelitian yang berfokus pada konteks mikro, seperti yang diusulkan dalam latar belakang penelitian ini, sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan dampak implementasi SDGs di desa-desa.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus khusus pada Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Wilayah ini dipilih sebagai studi kasus karena mewakili karakteristik umum desa-desa di Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan mikro ini, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan SDGs diterapkan di tingkat desa, tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, dan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat desa.

Dengan demikian, penelitian ini membawa kebaruan dalam literatur dengan menyediakan data empiris yang lebih detail dan spesifik mengenai implementasi SDGs di wilayah pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan efektif untuk konteks pedesaan, yang sering kali terabaikan dalam kebijakan pembangunan nasional. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan dimana sebuah kebijakan publik yang telah diatur akan berfungsi apabila diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Tresiana dan Duadji menyatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik dalam menerapkan atau melaksanakan segala bentuk keputusan, program, dan proyek yang telah ditentukan yang juga mempunyai kepentingan sebagai faktor penentu kegagalan atas keberhasilan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan (Tresiana dan Duadji, 2019). Selanjutnya, Mazmanian dan Sabatier dalam menjelaskan konsep implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan Negara, baik itu menyangkut usaha-usaha pengadministrasian maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi proses implementasinya (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, 2014). Menurut Suhendar dan Prasetya (2020) dalam Jurnal Kebijakan Desa, pendekatan berbasis musyawarah tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam pelaksanaannya. Musyawarah desa juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat, seperti kurangnya pengetahuan dalam mengelola hasil panen atau terbatasnya akses pasar untuk produk lokal.

Di lain pihak, menyatakan bahwa pada hakikatnya pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memperoleh pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang (Trifita dan Amaliyah, 2020). Lebih lanjut, Grindle dalam menyampaikan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas:

1. Isi kebijakan (*content of policy*) yang meliputi:
 - a. Kepentingan yang Terpengaruhi oleh kebijakan
 - b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan
 - d. Kedudukan pembuat kebijakan
 - e. Siapa pelaksana program
 - f. Sumber daya yang dikerahkan
2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*) yang meliputi:
 - a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
 - b. Karakteristik lembaga dan penguasa
 - c. Kepatuhan dan daya tanggap

Sustainable Development Goals

1. Definisi SDGs

SDGs merupakan singkatan dari *sustainable development goals* yang diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa kata “tujuan” memiliki arti yang dituju, maksud, tuntutan. Sedangkan kata “pembangunan” memiliki arti proses, cara, perbuatan membangun. Selanjutnya kata “berkelanjutan” memiliki arti berlangsung terus-menerus,

berkesinambungan. Sehingga, SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai dengan proses yang terus-menerus dan berkelanjutan. TPB atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah suatu agenda pembangunan global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta melindungi planet. Hal ini dapat dicapai dengan memenuhi 17 tujuan yang telah ditetapkan hingga tahun 2030.

2. SDGs Desa

Desa, atau yang juga dikenal sebagai Desa adat, merupakan suatu entitas hukum yang terdiri dari masyarakat yang memiliki wilayah yang ditetapkan dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Entitas ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Awalnya, desa di Indonesia dianggap sebagai wilayah yang sulit untuk dikembangkan dan sering dianggap tertinggal dalam hal pembangunan. Program-program yang dilaksanakan masih lebih berorientasi pada pusat atau wilayah perkotaan, sehingga desa seringkali mengalami kesenjangan pembangunan. Desa dianggap sebagai wilayah yang hanya menopang kehidupan kota, bukan sebagai wilayah yang memiliki potensi yang bisa dimajukan. Sumber daya yang ada di desa sering dieksploitasi, bukan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini sangat disayangkan, mengingat bahwa desa memiliki sumber daya alam yang melimpah, potensi budaya yang kaya, dan manusia yang dapat diberdayakan.

Program SDGs Desa adalah salah satu program dari Kementerian Desa yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta memberikan keamanan di desa. Program SDGs Desa merupakan program baru yang diinisiasi oleh Kementerian Desa melalui Permendes no 13 tahun 2020 untuk menjadi dasar dalam membangun desa secara berkelanjutan. Program SDGs Desa merupakan program prioritas dalam pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh Dana Desa, yang keberhasilan program SDGs sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak yang salah satu kendala utama dalam pemberdayaan ekonomi di desa adalah minimnya kemampuan masyarakat dalam mengelola dana usaha (Sustiawan, 2022). Iskandar (2021) mengemukakan bahwa implementasi SDGs di desa-desa di Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 74% dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam sektor ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa juga bertanggung jawab untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Pemerintah desa memiliki peran sebagai inisiator dan fasilitator utama dalam pelaksanaan kebijakan SDGs. Mereka bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga eksternal, seperti dinas pertanian atau perikanan, untuk mendukung pelaksanaan program. Masyarakat, di sisi lain, memainkan peran penting sebagai pelaksana program. Mereka berpartisipasi aktif dalam pelatihan, gotong royong, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan kebijakan. Misalnya, dalam pembangunan jalan desa, masyarakat bekerja sama menyediakan tenaga kerja, sementara pemerintah desa menyediakan bahan dan peralatan (Sutopo, 2020).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

13 Tahun 2020 telah menetapkan 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Tujuan tersebut mencakup: (1) desa tanpa kemiskinan; (2) desa tanpa kelaparan; (3) desa sehat dan sejahtera; (4) pendidikan desa berkualitas; (5) desa berkesetaraan gender; (6) desa layak air bersih dan sanitasi; (7) desa yang berenergi bersih dan terbarukan; (8) pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa; (9) inovasi dan infrastruktur desa; (10) desa tanpa kesenjangan; (11) kawasan pemukiman desa berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan; (13) pengendalian dan perubahan iklim oleh desa; (14) ekosistem laut desa; (15) ekosistem daratan desa; (16) desa damai dan berkeadilan; (17) kemitraan untuk pembangunan desa; (18) serta kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif

Salah satu hambatan internal dalam pelaksanaan SDGs di Desa adalah rendahnya tingkat literasi keuangan dan manajemen usaha di kalangan masyarakat. Banyak pelaku usaha mikro di desa ini masih belum memahami pentingnya pencatatan keuangan dan strategi bisnis. Hakim (2019) menyatakan bahwa kurangnya literasi keuangan menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, karena usaha kecil sulit berkembang tanpa pengelolaan keuangan yang baik.

Selain itu, resistensi terhadap inovasi dan teknologi juga menjadi tantangan. Masyarakat masih cenderung menggunakan cara-cara tradisional dalam bertani dan berdagang, sehingga produktivitas dan daya saing mereka rendah. Sari (2021) menemukan bahwa desa yang masih mempertahankan metode konvensional dalam produksi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan desa yang telah mengadopsi teknologi modern.

Disamping hambatan internal tersebut, pelaksanaan SDGs di Desa juga menghadapi berbagai hambatan eksternal yang tak kalah signifikan. Hambatan eksternal ini berasal dari faktor-faktor diluar kendali langsung masyarakat dan pemerintah desa, namun memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan program pembangunan desa berkelanjutan.

Salah satu tantangan eksternal yang cukup signifikan dalam pelaksanaan SDGs di Desa adalah ketidakstabilan harga pasar dan terbatasnya jalur distribusi hasil produksi. Ketidakpastian harga komoditas pertanian dan perikanan secara langsung memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat desa. Ramadhani (2022) mencatat bahwa ketidakpastian harga menjadi tantangan utama bagi petani dan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Kondisi ini membuat usaha tani dan nelayan rentan terhadap kerugian, terutama ketika harga jual jatuh dibawah biaya produksi.

Disamping itu, tantangan lain yang berdampak berasal dari kondisi iklim yang tidak menentu dan perubahan cuaca ekstrem. Widodo (2020) menyatakan bahwa perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Ketergantungan terhadap kondisi alam menjadikan aktivitas ekonomi desa sangat rentan terhadap guncangan iklim.

Kondisi infrastruktur yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat penting dalam mendukung pencapaian SDGs di tingkat desa. Terbatasnya akses transportasi dan distribusi menyebabkan hasil produksi masyarakat sulit dipasarkan secara luas. Fitriani (2020) menegaskan bahwa infrastruktur yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi desa karena biaya distribusi menjadi lebih tinggi dan akses pasar menjadi lebih terbatas.

Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Dengan arti lain pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses untuk menuju berdaya atau proses untuk memperoleh kekuatan serta pemberian kekuatan dari pihak yang memiliki kepada pihak yang sedang di berdayakan. Sedangkan pengertian “proses” menuju pada serangkaian tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis untuk mencerminkan tahapan upaya dalam mengubah masyarakat yang kurang ataupun belum berdaya menuju pemberdayaan. Pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan. Selain itu, adanya budaya gotong royong dalam masyarakat juga menjadi modal sosial yang penting. Putra (2021) menjelaskan bahwa modal sosial dalam bentuk kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa.

2. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Ahmad Karim berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha dari individu maupun berbagai kelompok dalam kegiatan sehari-hari untuk menciptakan hubungan ikatan yang baik guna memperoleh pendapat dan bagaimana mempergunakan pendapat tersebut. Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan ekonomi yaitu suatu kebutuhan masyarakat yang dinilai dengan uang atau barang dan dapat di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari manusia dengan memberikan jumlah yang besar atau banyak untuk kebutuhan yang bermanfaat. Sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat tersebut mengandung pesan penting terkait distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi yang adil. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa harta yang diperoleh dari penduduk suatu negeri tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi harus diberikan kepada mereka yang berhak, seperti kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, di mana sumber daya dan modal usaha harus disalurkan secara merata agar dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Dalam konteks pemberian modal usaha kepada kelompok tani dan nelayan, serta usaha mikro di desa, ayat ini mengajarkan bahwa kekayaan atau bantuan yang diberikan tidak hanya untuk memperkaya segelintir orang, tetapi juga harus membantu mereka yang membutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka, serta menciptakan pemerataan ekonomi.

Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, istilah "kesejahteraan" merujuk pada keadaan yang sejahtera, terpenuhi, dan aman dari segala gangguan. Istilah ini dapat diartikan sebagai pencapaian

kepentingan diri sendiri, pemenuhan kebutuhan fisik dasar, atau berkaitan dengan perasaan kebahagiaan individu (Cahyad, 2017). Kesejahteraan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *welfare* yang berarti *safety* atau keamanan. Sementara itu, dalam bahasa Arab, kesejahteraan dapat diungkapkan dengan kata *ar-arafah* atau *ar-rafahiyah* yang mengandung makna kemakmuran atau kenyamanan (Mahmudah dan Zulfa, 2018).

Beberapa penelitian akademik menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan masyarakat pada dasarnya dapat merujuk pada konsep kesejahteraan sosial. Melalui Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, negara menetapkan definisi kesejahteraan sosial sebagai keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan mengembangkan diri serta melaksanakan fungsi sosialnya. Definisi ini mencakup beberapa dimensi penting, seperti kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, keberdayaan ekonomi individu, layanan sosial yang memadai, pengembangan potensi diri, dan kemampuan melaksanakan fungsi sosial (Prihatin *et al*, 2018).

Kesejahteraan masyarakat dapat didefinisikan sebagai situasi di mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, seperti memiliki tempat tinggal yang layak, memperoleh sandang dan pangan yang cukup, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat dari aspek ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan (Raharjo, 2022). Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana setiap individu dapat memaksimalkan kepuasannya dengan memperhitungkan keterbatasan anggaran yang dimilikinya, dan merasa terpenuhi secara jasmani maupun rohani.

Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, terdapat berbagai upaya seperti rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Sedangkan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, tahapan awalnya dimulai dari tingkat keluarga. Widiastuti memandang bahwa terdapat beberapa tahapan dan tingkatan dalam kesejahteraan keluarga, diantaranya:

a. Tingkat Keluarga Pra Sejahtera

Kategori keluarga pra-sejahtera merujuk pada keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang harus dipenuhi secara manual.

b. Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap I

Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap I adalah tingkat di mana keluarga telah mencapai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, serta mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti kebutuhan ibadah, protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, penghasilan yang memadai, kemampuan membaca dan menulis bahasa latin, dan keluarga berencana.

c. Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga memenuhi kebutuhan sosial psikologis, namun masih belum memenuhi kebutuhan pengembangan seluruhnya masuk ke dalam kategori tingkat keluarga sejahtera tahap II. Kebutuhan pengembangan ini mencakup peningkatan keagamaan, kemampuan menabung, interaksi sosial dalam keluarga, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan kemampuan memperoleh informasi

melalui media.

d. Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap III

Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap III adalah ketika keluarga mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya serta kebutuhan sosio- psikologis dan pengembangannya. Namun, mereka belum dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada orang lain atau umat dalam bentuk harta benda.

e. Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga pada Tingkat Sejahtera Tahap III Plus telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan sosial-psikologis, serta mampu memberikan kontribusi berupa harta benda untuk kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga tersebut telah mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan (Sustiawan, 2022).

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 8 indikator dalam kesejahteraan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

a. Kependudukan

Tingkat kemajuan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Kendala pembangunan dapat terjadi jika jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik. Oleh karena itu, pengendalian jumlah penduduk sangat penting untuk mencegah ledakan penduduk yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Populasi yang besar memerlukan lebih banyak fasilitas dasar seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan, serta lapangan kerja yang cukup.

b. Kesehatan

Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu capaian SDGs yang menjadi prioritas, khususnya dalam tujuan ke-3 (Good Health and Well-being). Akses kesehatan di desa-desa terpencil seringkali terbatas oleh faktor geografis dan distribusi layanan (Lestari & Nurlina, 2019). Oleh karena itu, upaya peningkatan perlu dilakukan secara terintegrasi.

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk memperlihatkan tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin sehat masyarakatnya, keberhasilan program kesehatan masyarakat di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah desa dan dukungan fasilitas yang memadai (Siregar, 2020). Semakin baik dinamika dan proses pembangunan ekonomi di negara atau wilayah tersebut.

c. Pendidikan

Menjamin hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas adalah indikator keadilan dan kesetaraan dalam hasil pembangunan serta merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan pembangunan. Peningkatan, akses, dan pemerataan mutu pendidikan akan membantu warga Indonesia untuk mengembangkan kecakapan yang dibutuhkan dalam rangka memajukan pembangunan manusia secara keseluruhan. Nurhalimah dan Kurniawati (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam memfasilitasi akses pendidikan dasar secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah di wilayah perdesaan.

d. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan menjadi fokus utama pemerintah karena sensitivitasnya yang tinggi dan dampak yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan

masyarakat. Beberapa masalah utama dalam bidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran yang tinggi, kesempatan kerja yang terbatas, kurangnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak. Pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai ketenagakerjaan sangatlah penting untuk merancang kebijakan, strategi, dan program yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

e. Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi masyarakat dapat berubah akibat perubahan sosial dan budaya yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pola konsumsi ini memiliki pengaruh besar terhadap aspek sosial ekonomi dan sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam lingkungan tertentu akan membentuk pola konsumsi yang khas bagi kelompok masyarakat tersebut. Untuk mengungkap pola konsumsi rumah tangga, data pengeluaran dapat digunakan dengan indikator seperti proporsi pengeluaran untuk makanan dan non-makanan. Dari komposisi pengeluaran rumah tangga, dapat diukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

f. Perumahan dan Lingkungan

Salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan adalah rumah. Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga memiliki peran sebagai penentu indikator kesejahteraan masyarakat dan status sosial seseorang. Kualitas dan kondisi rumah juga dapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kesehatan penghuninya, serta memberikan rasa aman dan ketentraman hidup. Indikator kualitas lingkungan rumah tinggal dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kebersihan, ventilasi, dan ketersediaan air bersih.

g. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan dan non-makanan, yang diukur berdasarkan pengeluaran. Seseorang dianggap miskin jika pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Penting untuk memahami karakteristik dari penduduk miskin agar kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensi. Hal ini menjadi prasyarat dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

h. Sosial Lainnya

Dampak globalisasi yang semakin meluas sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kebutuhan masyarakat saat ini semakin berubah, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer seperti berlibur, memiliki eksistensi di masyarakat, dan akses teknologi informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi yang cepat antar wilayah dan negara menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi yang semakin canggih juga membuka akses tanpa batas ke dunia luar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat, dan pemerintah Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan SDGs dalam Pemberdayaan Ekonomi

Awalnya, desa di Indonesia dianggap sebagai wilayah yang sulit untuk dikembangkan dan sering dianggap tertinggal dalam hal pembangunan. Program-program yang dilaksanakan masih lebih berorientasi pada pusat atau wilayah perkotaan, sehingga desa seringkali mengalami kesenjangan pembangunan. Desa dianggap sebagai wilayah yang hanya menopang kehidupan kota, bukan sebagai wilayah yang memiliki potensi yang bisa dimajukan. Sumber daya yang ada di desa sering dieksploitasi, bukan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini sangat disayangkan, mengingat bahwa desa memiliki sumber daya alam yang melimpah, potensi budaya yang kaya, dan manusia yang dapat diberdayakan.

Program baru bernama SDGs Desa yang dicanangkan oleh Kementerian Desa dalam Permendes no 13 tahun 2020, bertujuan untuk menjadi dasar pembangunan desa yang berkelanjutan. Program SDGs Desa diutamakan sebagai program pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh Dana Desa (Sustiawan, 2022). Implementasi kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Pakkasalo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi proses implementasinya (Wahab, 2014). Dalam konteks Desa Pakkasalo, implementasi kebijakan SDGs menghadapi tantangan baik dari aspek internal maupun eksternal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iskandar (2021) menunjukkan bahwa implementasi SDGs di desa-desa di Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 74% dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam sektor ekonomi. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian di Desa Pakkasalo, di mana kebijakan SDGs telah diarahkan untuk meningkatkan sektor pertanian, perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama ekonomi masyarakat.

Namun, penelitian Ary Mustamiin Muadz (2022) di Kabupaten Ciamis menemukan bahwa implementasi kebijakan SDGs di tingkat desa masih mengalami kendala dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini juga terjadi di Desa Pakkasalo, di mana keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi belum optimal, sehingga perlu adanya sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif.

a. Proses Penerapan Kebijakan

Implementasi kebijakan SDGs di Desa Pakkasalo mengedepankan pendekatan yang berbasis partisipasi masyarakat. Proses dimulai dengan musyawarah desa, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung untuk memberikan masukan mengenai kebutuhan dan prioritas program pembangunan. Pemerintah desa secara aktif memfasilitasi dialog dengan masyarakat, memastikan bahwa program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat, seperti pembangunan irigasi, pelatihan keterampilan, dan penyediaan modal usaha.

Menurut Suhendar dan Prasetya (2020) dalam Jurnal Kebijakan Desa, pendekatan berbasis musyawarah tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam pelaksanaannya. Musyawarah desa juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat, seperti kurangnya pengetahuan dalam mengelola hasil panen atau terbatasnya akses pasar untuk produk lokal.

Penerapan kebijakan SDGs di Desa Pakkasalo mengikuti pendekatan partisipatif, di mana kebijakan yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Grindle (2019), tingkat keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh faktor isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Dalam praktiknya, kebijakan SDGs di desa ini dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, serta kelompok petani dan nelayan untuk menentukan prioritas pembangunan. Model musyawarah ini sejalan dengan temuan penelitian Sustiwana (2022), yang menyebutkan bahwa keberhasilan program SDGs sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak.

Namun, penelitian La Ode Sabirila Jayalangi (2023) menemukan bahwa partisipasi dalam kebijakan SDGs masih cenderung didominasi oleh kelompok tertentu, sementara kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda sering kali tidak mendapatkan akses yang sama dalam perencanaan kebijakan. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana masih ada kesenjangan dalam keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Proses penerapan kebijakan SDGs di Desa Pakkasalo memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan program pembangunan. Melalui musyawarah desa, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan. Tradisi gotong royong yang kuat juga menjadi landasan sosial yang memperkuat pelaksanaan kebijakan, terutama dalam proyek-proyek yang membutuhkan kolaborasi, seperti pembangunan jalan atau irigasi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah desa perlu memperluas jangkauan dialog dengan kelompok masyarakat yang sering kali kurang terwakili, seperti perempuan dan pemuda.

b. Bentuk Program yang Dijalankan

Program-program yang dijalankan dalam kerangka SDGs di Desa Pakkasalo mencakup beberapa aspek utama, yaitu pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pembangunan infrastruktur.

1) Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan diberikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian dan perikanan. Misalnya, petani diajarkan teknik-teknik modern dalam mengelola lahan dan hasil panen, seperti penggunaan pupuk organik dan sistem irigasi tetes. Nelayan, di sisi lain, dilatih cara menggunakan jaring modern untuk meningkatkan hasil tangkapan.

Pelatihan keterampilan diberikan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan teknik produksi dan pemasaran hasil usaha mereka. Studi Doef, Hardianto, dan Suprojo (2023) menunjukkan bahwa program edukatif dalam implementasi SDGs sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Pakkasalo, pelatihan ini mencakup penggunaan pupuk organik, sistem irigasi modern, serta teknik pengolahan hasil perikanan yang lebih efisien.

2) Pemberian Modal Usaha

Pemberian modal usaha kepada kelompok tani dan nelayan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas mereka, dengan memungkinkan petani membeli peralatan produksi seperti traktor dan bibit unggul, serta memberikan akses kepada nelayan untuk memperoleh peralatan tangkap yang lebih modern. Selain itu, bantuan ini juga mendukung pengembangan usaha mikro di desa, seperti pembuatan kerajinan tangan dan produk

olahan makanan.

Hal ini sejalan dengan prinsip yang diajarkan dalam QS. Al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat tersebut mengandung pesan penting terkait distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi yang adil. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa harta yang diperoleh dari penduduk suatu negeri tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi harus diberikan kepada mereka yang berhak, seperti kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, di mana sumber daya dan modal usaha harus disalurkan secara merata agar dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Dalam konteks pemberian modal usaha kepada kelompok tani dan nelayan, serta usaha mikro di desa, ayat ini mengajarkan bahwa kekayaan atau bantuan yang diberikan tidak hanya untuk memperkaya segelintir orang, tetapi juga harus membantu mereka yang membutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka, serta menciptakan pemerataan ekonomi.

Selain itu, bantuan modal usaha diberikan kepada kelompok tani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Penelitian Arief Bakhtiar Darmawan (2023) menunjukkan bahwa modal usaha yang disalurkan melalui kebijakan SDGs mampu meningkatkan produktivitas masyarakat jika diikuti dengan pendampingan yang tepat. Namun, dalam implementasi di Desa Pakkasalo, masih terdapat tantangan dalam hal pengelolaan modal, di mana sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan bisnis.

3) Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan jalan desa, irigasi, dan pasar lokal menjadi prioritas utama dalam mendukung aktivitas ekonomi. Jalan yang lebih baik mempermudah distribusi hasil panen, sedangkan irigasi membantu petani meningkatkan produktivitas lahan mereka. Renovasi pasar lokal bertujuan memberikan akses pasar yang lebih layak bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan desa, jembatan, dan sistem irigasi juga menjadi fokus utama dalam implementasi SDGs. Studi Aryani dan Ningrum (2023) menyoroti bahwa permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur di desa adalah kurangnya pemeliharaan dan keberlanjutan fasilitas yang telah dibangun. Kondisi ini juga terjadi di Desa Pakkasalo, di mana meskipun beberapa infrastruktur telah dibangun, masih diperlukan strategi untuk menjaga keberlanjutan penggunaannya.

c. Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat

Pemerintah desa memiliki peran sebagai inisiator dan fasilitator utama dalam pelaksanaan kebijakan SDGs. Mereka bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga eksternal, seperti dinas pertanian atau perikanan, untuk mendukung pelaksanaan program. Masyarakat, di sisi lain, memainkan peran penting sebagai

pelaksana program. Mereka berpartisipasi aktif dalam pelatihan, gotong royong, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan kebijakan. Misalnya, dalam pembangunan jalan desa, masyarakat bekerja sama menyediakan tenaga kerja, sementara pemerintah desa menyediakan bahan dan peralatan (Sutopo, 2020).

Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan SDGs. Pemerintah desa sebagai penggerak utama memastikan bahwa sumber daya tersedia dan program berjalan sesuai rencana. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat, terutama melalui gotong royong, mencerminkan semangat kolektivitas yang masih terjaga di Desa Pakkasalo. Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi ini, pemerintah desa perlu memperkuat kapasitas internal mereka, seperti melalui pelatihan manajemen program bagi perangkat desa.

d. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan SDGs

Meskipun kebijakan SDGs telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Pakkasalo, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Tantangan internal yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi rendahnya literasi keuangan masyarakat, yang membuat mereka kesulitan dalam mengelola bantuan modal usaha. Hal ini sejalan dengan temuan Sustiwana (2022), yang menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam pemberdayaan ekonomi di desa adalah minimnya kemampuan masyarakat dalam mengelola dana usaha.

Selain itu, tantangan eksternal seperti fluktuasi harga pasar dan kondisi cuaca yang tidak menentu juga berpengaruh terhadap keberhasilan program SDGs. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Ary Mustamiin Muadz (2022), faktor eksternal seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi global dapat menjadi hambatan bagi keberlanjutan program SDGs di tingkat desa.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan SDGs di Desa Pakkasalo menunjukkan keberhasilan dalam menggabungkan pendekatan partisipatif dengan program yang berbasis kebutuhan lokal. Meskipun menghadapi tantangan, keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan membangun infrastruktur menunjukkan bahwa program ini berjalan sesuai tujuan. Namun, keberlanjutan program memerlukan evaluasi rutin dan peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal untuk mengatasi kendala yang ada.

2. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pelaksanaan SDGs

a. Sumber Daya Lokal yang Mendukung

Desa Pakkasalo memiliki potensi sumber daya alam yang menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan SDGs. Sumber daya ini mencakup lahan pertanian yang subur, perairan yang kaya ikan, dan akses terhadap air untuk irigasi. Potensi ini dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pertanian dan perikanan. Selain itu, keberadaan pasar lokal yang menjadi tempat distribusi hasil panen juga memberikan kontribusi penting dalam mendukung keberlanjutan program. Budaya gotong royong yang kuat di desa ini juga menjadi salah satu faktor pendukung utama. Dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, masyarakat secara sukarela terlibat melalui kerja bakti. Misalnya, pembangunan jalan desa dan irigasi melibatkan banyak warga yang menyumbangkan tenaga mereka. Partisipasi ini tidak hanya mengurangi biaya operasional program, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antarwarga.

Selain itu, adanya budaya gotong royong dalam masyarakat juga menjadi modal sosial yang penting. Putra (2021) menjelaskan bahwa modal sosial dalam bentuk kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pembangunan

desa. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah dan modal sosial yang kuat di Desa Pakkasalo memberikan dorongan positif dalam pelaksanaan SDGs. Namun, pemanfaatan sumber daya ini perlu dioptimalkan dengan inovasi dan kebijakan yang tepat agar dampaknya lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

b. Hambatan Internal

Hambatan internal yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan SDGs di Desa Pakkasalo meliputi rendahnya literasi keuangan masyarakat. Banyak warga yang belum terbiasa mengelola modal usaha secara efektif, sehingga manfaat dari bantuan modal tidak maksimal. Hakim (2019) menyatakan bahwa kurangnya literasi keuangan menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, karena usaha kecil sulit berkembang tanpa pengelolaan keuangan yang baik.

Selain itu, resistensi terhadap teknologi baru menjadi kendala lain, terutama di sektor pertanian, di mana petani lebih nyaman menggunakan metode tradisional yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun. Hambatan lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan sumber daya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, seperti penebangan hutan untuk membuka lahan atau penggunaan pestisida secara berlebihan yang merusak ekosistem tanah.

Sari (2021) menemukan bahwa desa yang masih mempertahankan metode konvensional dalam produksi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan desa yang telah mengadopsi teknologi modern. Rendahnya literasi keuangan dan resistensi terhadap teknologi menjadi hambatan internal yang perlu segera diatasi. Pemerintah desa dan pihak terkait perlu meningkatkan program pelatihan dan edukasi agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan serta mampu mengelola usahanya secara lebih efektif.

c. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan SDGs di Desa Pakkasalo antara lain adalah fluktuasi harga pasar dan keterbatasan akses pasar. Harga komoditas hasil pertanian dan perikanan sering mengalami ketidakstabilan, yang berdampak pada pendapatan masyarakat. Ramadhani (2022) mencatat bahwa ketidakpastian harga menjadi tantangan utama bagi petani dan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Selain itu, faktor cuaca dan perubahan iklim juga menjadi tantangan besar. Widodo (2020) menyatakan bahwa perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Musim hujan yang terlalu panjang atau musim kemarau yang ekstrem dapat menghambat produktivitas pertanian dan perikanan.

Kurangnya infrastruktur, seperti akses transportasi dan fasilitas distribusi, juga menjadi kendala. Jalan yang kurang memadai serta keterbatasan sarana distribusi membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka. Fitriani (2020) menegaskan bahwa infrastruktur yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi desa karena biaya distribusi menjadi lebih tinggi dan akses pasar menjadi lebih terbatas.

Hambatan eksternal seperti ketidakstabilan harga, perubahan iklim, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan SDGs di Desa Pakkasalo. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan intervensi dari pemerintah dalam bentuk kebijakan stabilisasi harga, pembangunan infrastruktur, serta dukungan pemasaran bagi pelaku usaha di desa.

3. Dampak Implementasi Kebijakan SDGs terhadap Kesejahteraan Masyarakat

a. Pendapatan Masyarakat

Implementasi kebijakan SDGs di Desa Pakkasalo memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis sektor perikanan dan pertanian. Pendekatan ini sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka (Suryani, 2021). Dalam konteks pembangunan desa, peningkatan pendapatan merupakan indikator langsung dari keberhasilan program pembangunan berkelanjutan.

Damayanti (2021) di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa implementasi SDGs berbasis ekonomi lokal berkontribusi signifikan terhadap kenaikan pendapatan rumah tangga masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan temuan di Desa Pakkasalo yang memperlihatkan tren peningkatan pendapatan, meskipun belum merata di seluruh kelompok masyarakat.

b. Akses terhadap Layanan Kesehatan

Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu capaian SDGs yang menjadi prioritas, khususnya dalam tujuan ke-3 (Good Health and Well-being). Desa Pakkasalo mengalami kemajuan dalam penyediaan layanan dasar seperti posyandu, imunisasi, dan edukasi kesehatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Siregar (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan program kesehatan masyarakat di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah desa dan dukungan fasilitas yang memadai.

Meskipun akses terhadap fasilitas kesehatan meningkat, kendala masih ditemukan dalam hal jarak dan ketersediaan tenaga medis. Penelitian oleh Lestari dan Nurlina (2019) juga menunjukkan bahwa akses kesehatan di desa-desa terpencil seringkali terbatas oleh faktor geografis dan distribusi layanan. Oleh karena itu, upaya peningkatan perlu dilakukan secara terintegrasi.

c. Kemajuan di Sektor Pendidikan

Peningkatan di sektor pendidikan merupakan salah satu dampak penting dari implementasi kebijakan SDGs, terutama dalam mendukung tujuan ke-4 SDGs yaitu Pendidikan Berkualitas. Di Desa Pakkasalo, kebijakan pembangunan yang dilakukan mendorong peningkatan sarana pendidikan seperti rehabilitasi gedung sekolah, pemberian beasiswa, serta pelatihan keterampilan untuk remaja desa.

Selain pembangunan fisik, penguatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Dalam konteks ini, implementasi SDGs di Desa Pakkasalo sudah mulai menunjukkan dampak melalui peningkatan partisipasi belajar anak usia sekolah serta pelatihan bagi guru honorer. Nurhalimah dan Kurniawati (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam memfasilitasi akses pendidikan dasar secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah di wilayah perdesaan.

d. Perbaikan Infrastruktur dan Kondisi Perumahan

Salah satu dampak yang paling terlihat dari implementasi SDGs adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, dan fasilitas air bersih. Menurut Raharjo (2022), infrastruktur yang memadai baik dalam segi, perumahan, Pendidikan, dan kesehatan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Di Desa Pakkasalo, perbaikan infrastruktur juga berdampak pada peningkatan aksesibilitas antar wilayah serta mempermudah distribusi hasil pertanian dan perikanan. Kondisi perumahan masyarakat pun mengalami perbaikan melalui program bantuan rumah

layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi SDGs dengan program lokal mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Pembangunan jalan desa, irigasi, dan renovasi rumah memberikan dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Jalan desa yang lebih baik mempermudah distribusi hasil panen, sedangkan renovasi rumah meningkatkan kesehatan dan kenyamanan keluarga.

Perbaikan infrastruktur memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Namun, pemerintah desa perlu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dikelola dengan baik dan dipelihara secara berkelanjutan agar manfaatnya tetap dirasakan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Pakkasalo dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung yang diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kelompok tani dengan Pemerintah sebagai fasilitator utama dan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam gotong royong.

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah potensi sumber daya lokal. Namun, hambatan internal yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi pertanian dan manajemen keuangan. Hambatan eksternal berupa infrastruktur jalan yang belum memadai di beberapa wilayah desa, fluktuasi harga pasar, dan cuaca yang tidak menentu juga menjadi kendala yang signifikan.

Dampak kebijakan SDGs di Desa Pakkasalo terlihat nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan masyarakat meningkat berkat bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, yang mendorong produktivitas di sektor pertanian dan distribusi hasil panen. Dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, sosial dan budaya. Secara keseluruhan, kebijakan ini memberikan perubahan positif yang signifikan, meskipun beberapa tantangan masih perlu diselesaikan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah. (2024, November 14). Personal interview.
- Alisjahbana, A. S. (2018). Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target, dan strategi implementasi. Bandung, Indonesia: Unpad Press.
- Aryani, L., & Ningrum, R. K. (2023). Sosialisasi program Sustainable Development Goals desa dalam menentukan arah pembangunan desa di Kabupaten Karawang. *Jurnal Panrita Abdi*, 7(2), 112–125.
- Bappenas. (2017). Rencana aksi nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2017–2019. Jakarta, Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Budihardjo. (2020). Implementasi SDGs di desa. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 3(1), 45–60.
- Cahyadi, D. (2017). Analisis pengukuran kesejahteraan di Indonesia [Unpublished doctoral dissertation]. Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.
- Darmawan, A. B., Sulistyning, A. R., Santoso, J., & et al. (2023). Implementasi kebijakan Sustainable Development Goals pemerintah daerah dalam mengelola ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Desa Pandak, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 201–220.
- Doef, W. T. H., & Suprojo, A. (2023). Implementasi kebijakan Sustainable Development Goals desa dalam penuntasan kemiskinan di Desa Kunyit Hulu Kabupaten Mampawah. *Jurnal*

-
- Ilmiah Publika, 9(2), 78–90.
- Grindle, M. S. (2017). Policy content and context. *Policy Analysis Journal*, 15(3), 301–315.
- Handayani, D. (2019). Akses kredit bagi petani dan nelayan di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 89–104.
- Hartono, J., & et al. (2018). Metode pengumpulan dan teknik analisis data. Yogyakarta, Indonesia: Andi.
- Jayalangi, L. O. S., & Bakri, T. (2023). Implementasi kebijakan Permendes PDPTT No. 21 Tahun 2020 dalam mewujudkan Sustainable Development Goals di Desa Jaya Kencana Kecamatan Tolili Kabupaten Banggai. *Jurnal Ilmiah Clean Government*, 6(1), 45–60.
- Jufri, M. (2024, November 13). Personal interview.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). Profil sektor perikanan di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Author.
- Kementerian Pertanian. (2020). Statistik pertanian Indonesia. Jakarta, Indonesia: Author.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jakarta, Indonesia: Author.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Kolaborasi untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jakarta, Indonesia: Author.
- Kharisma, B. (2020). Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia: A study of economic empowerment policies. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 33–50.
- Kusumawati, A. (2020). Pemberdayaan desa melalui SDGs. *Jurnal Desa Maju*, 5(2), 67–80.
- Mahmudah, S. N., & Zulfa, F. E. (2018). Pengaruh zakat maal terhadap tingkat kesejahteraan mustahiq di Yatim Mandiri Kediri. *Jurnal Al-Hikmah*, 6(1), 23–35.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (2019). Policy implementation in developing nations. *Public Policy Review*, 25(4), 412–430.
- Muadz, A. M. (2022). Implementasi kebijakan Sustainable Development Goals desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Unigal Repository*, 2(2), 101–115.
- Nations, U. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, NY: United Nations.
- Patimbangi, A., & Darwis, R. H. (2020). Metodologi penelitian kualitatif (1st ed.). Yogyakarta, Indonesia: Lintas Nalar, CV.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jakarta, Indonesia: Author.
- Purnamasari, L. (2020). Efektivitas program bantuan modal bagi petani di Indonesia. *Journal of Rural Development*, 12(3), 145–160.
- Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata. (2022). Penguatan generasi milenial mendukung SDGs desa. Semarang, Indonesia: LPPM UNNES.
- Rahman, A., & et al. (2021). Evaluasi dampak SDGs terhadap desa. *Jurnal Pembangunan Lokal*, 8(1), 56–70.
- Rahman, A., & et al. (2022). Impact of SDGs on economic development in urban areas of Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 15(4), 88–102.
- Rahmatang. (2024, November 15). Personal interview.
- Rosani, A. (2024, November 11). Personal interview.
- Rumidi, S. (2012). Metodologi penelitian: Petunjuk praktik untuk peneliti pemula. Yogyakarta,

- Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Rusdi. (2024, November 11). Personal interview.
- Silalahi, U. (2009). Metode penelitian sosial. Bandung, Indonesia: Refika Aitama.
- Sugiyono. (2013). Metodologi penelitian kualitatif, R&D. Bandung, Indonesia: Alfabeta CV.
- Sustiawan, A. (2022). Efektivitas program SDGs desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ngabar Ponorogo [Unpublished master's thesis]. IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia.
- Tambunan, T. T. H. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 18.
- Triatmanto, B. (2021). Menggagas percepatan pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG's). Malang, Indonesia: Selaras Media Kreasind.
- Trifta, A., & Amaliyah, R. (2020). Ruang publik dan kota berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Global & Policy*, 8(2), 77–90.
- Yuliana, R. (2019). Akses teknologi pertanian dan perikanan di daerah pedesaan. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 14(3), 101–115.
- Yulianti, A. (2019). Strategi inovasi untuk pemberdayaan desa. *Jurnal Kebijakan Lokal*, 7(2), 88–100.
- Yulianti, A., & Kurniawan, F. (2021). Implementation of SDGs in major provinces in Indonesia. *International Journal of Development Policy*, 9(3), 123–138.